

Penatausahaan Asset Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) Di Kabupaten Malang

(Studi Pada Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)

Luhur Nurmala Rizqi, Tjahjanulin Domai, Abdul Wachid

Jurusan Administrasi Publik, FIA, Universitas Brawijaya, Malang

Email:-

Abstract

In carrying out the administration of local government assets that are still there are problems particularly in local government asset data collection is done manually by the Revenue Service Sector Asset Finance and Asset Management (DPPKA). So that the necessary changes in the administration of assets, is now using a work called Local Assets Management Information Systems (SIMBADA). The purpose of this study was to identify and analyze the administration of local government assets through (SIMBADA) in Malang Regency and constraints. This research uses descriptive qualitative research approach. The result of this research is in the area of administration of assets owned by SIMBADA conducted by Field Asset has not reached the maximum, there is still a problem in the application. Therefore DPPKA Asset particular field need cooperation among stakeholders, improve surveillance, monitoring and evaluation as well as more frequent conduct technology development (BINTEK).

Keyword: *Assets Administration, Information Management Systems, Assets*

Abstrak

Dalam melaksanakan penatausahaan asset pemerintah daerah yang masih terdapat permasalahan khususnya dalam pendataan asset pemerintah daerah yang dilakukan secara manual oleh Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA). Sehingga diperlukan perubahan dalam proses penatausahaan asset, kini menggunakan alat kerja yang disebut Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penatausahaan asset Pemerintah Daerah melalui (SIMBADA) di Kabupaten Malang dan kendala-kendalanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penatausahaan asset milik daerah melalui SIMBADA yang dilakukan oleh Bidang Asset belum tercapai maksimal, masih terdapat masalah didalam penerapannya. Oleh karena itu DPPKA khususnya bidang Asset perlu melakukan kerjasama antara pihak yang terkait, meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta lebih sering melakukan bina teknologi (BINTEK).

Kata Kunci: *Penatausahaan asset/barang milik daerah, Sistem Informasi Manajemen, Asset*

Pendahuluan

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Asset Daerah. Terjadi adanya perubahan paradigma baru dalam pengelolaan barang milik daerah atau asset daerah yang ditandai dengan di keluarkannya PP No. 6 Tahun 2006 yang

merupakan peraturan turunan dari UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menimbulkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan asset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan untuk kedepannya. Pengelolaan asset daerah yang profesional dan modern diharapkan akan mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan

stake holder lainnya kepada pemerintah untuk pengelolaan asset daerah.

Pada dewasa ini telah banyak timbul permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Permasalahan ini tidak hanya di alami oleh pemerintah pusat, namun di tingkat daerah juga masih banyak permasalahan dalam proses pengelolaan asset daerah, seperti yang terjadi di pemerintah Kabupaten Malang. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain yaitu terdapat adanya perubahan dari beberapa peraturan perundang-undangan di bidang BMN. Namun, pada dasarnya terdapat ciri yang menonjol dari produk-produk hukum tersebut yaitu meletakkan landasan hukum dalam bidang administrasi keuangan negara dan melakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dan pemegang kewenangan perbendaharaan. Kemudian sejalan dengan kebijakan nasional yaitu adanya otonomi daerah serta bergulirnya perubahan struktur kabinet yang memunculkan penghapusan suatu kementerian di satu sisi dan pendirian kementerian pada sisi yang lain membawa implikasi adanya mutasi barang milik negara atau daerah.

Permasalahan dalam pengelolaan asset daerah tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan dari peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, namun juga dipengaruhi karena banyaknya asset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut seperti yang di alami oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam hal penatausahaan asset daerah, masih banyak asset atau barang milik daerah yang belum masuk dalam data inventarisasi barang milik daerah. Permasalahan tersebut muncul akibat sistem pengelolaan asset yang masih bersifat manual mulai dari pendataan hingga inventarisasi yang merupakan kegiatan dari Penatausahaan.

Oleh karena itu, disini Pemerintah Kabupaten Malang khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Asset berinovasi merubah pola sistem pengelolaan yang lama (manual) dengan menerapkan sebuah Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah atau SIMBADA dalam proses pengelolaan asset

daerah terutama pada bagian penatausahaan. Sistem Informasi memegang peranan penting dalam proses pengelolaan asset Pemerintah Daerah, karena dengan adanya sistem informasi barang daerah pengelolaan asset akan lebih tertata, akuntabel dan transparan serta dapat mengurangi beban kerja pada Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA).

Namun dalam pelaksanaannya program SIMBADA masih belum maksimal dalam proses pengelolaan asset daerah, SIMBADA belum mampu menjadi alat kerja secara keseluruhan bagi proses pengelolaan asset atau barang milik daerah yang terdapat 13 tahap pengelolaan asset, tapi jika dibandingkan dengan sistem pengelolaan yang lama (manual) sudah lebih bagus dan cukup membantu dalam pengelolaan asset Pemerintah Daerah terutama dalam bidang penatausahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis berusaha mengulas lebih dalam tentang penatausahaan asset Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Barang Daerah atau SIMBADA di Kabupaten Malang, serta kendala dalam proses Penatausahaan asset Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah di Kabupaten Malang.

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penatausahaan asset pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di Kabupaten Malang?
2. Apa saja kendala yang mempengaruhi proses penatausahaan asset Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di Kabupaten Malang?

Kajian Pustaka

1. Administrasi Publik

Pengertian administrasi publik sendiri menurut para ahli dikutip dalam Pasolong, (2007, h.2-3), diuraikan sebagai berikut: Simon mendefinisikan administrasi sebagai “kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Dimock & Dimock, mengatakan bahwa, “administrasi adalah suatu ilmu yang memepelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen”.

2. Peranan Administrasi Publik

Peranan administrasi publik Menurut Widjaja (2005,h.4) “peranan administrasi publik tidak cukup hanya dalam konsep dan teori semata, tetapi benar-benar dapat mewujudkan suatu disiplin ilmu(ilmu administrasi) yang mampu memecahkan masalah yang semakin kompleks dan rumit, khususnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah”. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran administrasi publik sangat diperlukan untuk keseimbangan wewenang dalam rangka otonomi daerah yang bertujuan pada pelayanan dan kesejahteraan umum sebagai salah satu bentuk pencerminan negara demokrasi.

3. Barang/Asset Milik Daerah

Barang/asset milik daerah menurut Mahmudi (2010,h.146) adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

a. Azaz-Azaz Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang/Asset Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang/asset milik daerah dengan memperhatikan azaz-azaz yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 yaitu Azaz fungsional, Azaz Kepastian Hukum,

Azaz Transparansi, Azaz Efisiensi, Azaz Akuntabilitas dan Azaz Kepastian Nilai.

b. Prinsip-Prinsip Manajemen Asset atau Barang Milik Daerah

Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam manajemen asset daerah adalah Pemerintah Daerah harus melakukan manajemen asset tersebut sejak tahap perencanaan sampai pada tahap pada tahap penghapusan asset. Semua tahap tersebut harus terdokumentasi dengan baik. (Mahmudi 2010,h.157-158).

Prinsip-prinsip manajemen asset daerah meliputi:

- 1) Pengadaan asset tetap harus dianggarkan
- 2) Pada saat pembelian harus dilengkapi dokumen transaksi
- 3) Pada saat digunakan harus dilakukan pencacatan/administrasi secara baik
- 4) Pada saat penghentian harus dicatat dan diotorisasi

4. Sistem Informasi Manajemen

a. Pengertian Data

Menurut Antony dan Dearden dikutip oleh Jogyanto (2005,h.8), Data adalah:

“Bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data-item.dan Data Merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata.”

b. Pengertian sistem

Ada berbagai pendapat yang mendefinisikan pengertian sistem,seperti dibawah ini:

“Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling kumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”.(Jogyanto,2005,h.1).

Masih menurut Jogyanto menerangkan:

“Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.(Jogyanto,2005,h.2).

c. Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi didalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen.

Menurut Cushing dikutip oleh Jogyanto, Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah:

Suatu sistem informasi manajemen adalah Kumpulan dari manusia dan sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian”.(Jogyanto,2005,h.14).

Menurut Davis dikutip oleh Jogyanto (2005,h.15), Sistem Informasi Manajemen, adalah “Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem yang melakukan fungsi-fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi”.

d. Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem (*system development*) dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Menurut Jogyanto (2005,h.35), Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti

e. Peranan Sistem Informasi Bagi Manajemen

Beberapa manfaat atau peranan serta fungsi sistem informasi menurut Jogyanto (2005,h.18) antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya prantara sistem informasi.
- 2) Mengembangkan proses perencanaan asset atau barang milik daerah yang efektif.
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi.

- 4) Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.
- 5) Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka.

f. Analisis Sistem

Analisis sistem (*system analisis*) dapat didefinisikan sebagai berikut:

Analisis Sistem yaitu Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-

permasalahan,kesempatan-kesempatan,hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

(Jogyanto,2005,h.129).

g. Langkah-Langkah Analisis Sistem

Didalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem sebagai berikut:

- 1) *Identify*, yaitu mengidentifikasi masalah.
- 2) *Understand*, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.
- 3) *Analyze*, yaitu menganalisis sistem.
- 4) *Report*, yaitu membuat laporan hasil analisis. (Jogyanto, 2005,h.130)

h. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)

Sistem Informasi saat ini memegang peranan penting dalam pelaksanaan administrasi kantor, karena dengan adanya sistem informasi tersebut dapat menunjang kinerja serta tugas pokok dan fungsi dari kantor pemerintahan. Salah satunya adalah Pemerintah Daerah dalam proses pengelolaan asset atau barang milik daerah yang menerapkan program Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah atau yang biasa dikenal dengan SIMBADA. Program

SIMBADA tersebut dimulai sejak tahun 2009.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bodgan dan Taylor dikutip oleh Moleong (2001,h.3) bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Malang dan yang menjadi situs penelitian adalah Bidang Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Kabupaten Malang. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan *interactive model of analysis* yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2009,h.196) melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Pembahasan

Kajian terhadap pengelolaan asset atau barang milik daerah, khususnya disini penatausahaan asset atau barang daerah, tidak terlepas dari bagian administrasi, yang secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengelola informasi, manusia, harta benda, hingga tercapainya tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Administrasi dipergunakan dalam proses atau kegiatan. Herbert A. Simon mendefinisikan administrasi sebagai “kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama” (Pasolong, 2007,h.2).Berdasarkan teori diatas,penatausahaan asset atau barang milik daerah merupakan peranan dari administrasi publik, sebab dalam proses penatausahaan asset atau barang milik daerah ada peran penting bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan strategi penatausahaan asset atau barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Sepertinya halnya menurut (Widjaja 2005,h.4) “peranan administrasi

publik tidak cukup hanya dalam konsep dan teori semata, tetapi benar-benar dapat mewujudkan suatu disiplin ilmu(ilmu administrasi) yang mampu memecahkan masalah yang semakin kompleks dan rumit, khususnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah”.

Selanjutnya, untuk penatausahaan asset atau barang milik daerah melalui sistem informasi manajemen barang daerah adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Penatausahaan Asset Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

Identifikasi penatausahaan asset merupakan langkah awal dalam proses analisis penatausahaan asset Pemerintah Daerah melalui SIMBADA. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jogyanto (2005,h.129) langkah awal dalam proses analisis suatu sistem informasi adalah identifikasi (*Identify*).

Menurut pendapat diatas, maka yang akan dilakukan peneliti pertama kali adalah dengan mengidentifikasi masalah dari proses penatausahaan asset atau barang milik daerah melalui SIMBADA. Dari hasil temuan peneliti dilapangan, bahwa dalam identifikasi pengelolaan asset atau barang daerah secara keseluruhan, SIMBADA belum dapat diterapkan dalam seluruh proses pengelolaan asset atau barang milik daerah, disini SIMBADA masih diterapkan dalam proses penatausahaan asset atau barang milik daerah. Meskipun masih diterapkan dalam satu bagian proses pengelolaan asset atau barang milik daerah, dengan pengelolaan yang baik dalam hal penatausahaan melalui SIMBADA akan secara tidak langsung mempengaruhi proses dari pengelolaan asset atau barang milik daerah yang lainnya. Seperti halnya menurut pendapat Barry E.Chusing dalam Jogyanto (2005,h.14) Sistem Informasi Manajemen adalah kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal didalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.Dari pendapat diatas dapat

disimpulkan, bahwa dalam sistem informasi disini terutama SIMBADA meski hanya diterapkan pada bagian penatausahaan dalam proses pengelolaan aset dapat mempengaruhi bagian-bagian yang lain apabila diterapkan dengan maksimal.

Kemudian peran dari SIMBADA merupakan sebagai alat bantu untuk proses pengidentifikasian aset atau barang milik daerah khususnya dalam hal penatausahaan. Seperti pendapat dari Davis dalam Jogyanto(2005,h.15) Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem manusia/mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Disini diharapkan dengan adanya SIMBADA proses pengelolaan aset atau barang milik daerah khususnya pada bagian penatausahaan dapat diperoleh data yang akurat, transparan dan akuntabel seperti pada azaz-azaz dalam pengelolaan aset atau barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2007

Meskipun pada faktanya, masih terdapat adanya kekurangan serta kendala dalam proses penatausahaan melalui SIMBADA

2. Mekanisme Penatausahaan Aset Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah

Mekanisme penatausahaan aset atau barang milik daerah seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen aset daerah yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010,h.157) Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam manajemen aset daerah adalah Pemerintah Daerah harus melakukan manajemen aset tersebut sejak tahap perencanaan sampai tahap penghapusan aset. Semua tahap tersebut harus terdokumentasi dengan baik. Dari pendapat tersebut, dalam proses mekanisme penatausahaan aset atau barang milik daerah melalui SIMBADA seharusnya dilakukan secara tertib, agar dengan adanya SIMBADA dapat menciptakan pengelolaan aset atau barang milik daerah yang lebih baik.

Kemudian dalam mekanisme penatausahaan aset atau barang milik melalui SIMBADA daerah seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen aset daerah seperti menurut Mahmudi (2010,h.157) yaitu:

1. Pada saat pembelian harus dilengkapi dengan dokumen transaksi
2. Pada saat digunakan harus dilakukan pencacatan/administrasi secara baik
3. Pada saat penghentian harus dicatat dan diotorisasi

Disini dalam mekanisme penatausahaan aset atau barang milik daerah prinsip-prinsip diatas yang harus diterapkan dalam hal penatausahaan, karena pencacatan dalam pembukuan merupakan bagian kegiatan dari penatausahaan aset atau barang milik daerah yang akan diinput dalam SIMBADA. Dalam penatausahaan aset atau barang milik daerah SIMBADA berfungsi sebagai alat kerja untuk pendataan aset atau barang daerah yang lebih cepat dan akurat. Meskipun, tidak semua mekanisme pengelolaan aset atau barang milik daerah menggunakan SIMBADA. Namun, fungsi dari sistem informasi itu sendiri merupakan suatu alat pengolah data yang membantu suatu organisasi menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti yang disampaikan oleh Leitch dan Davis dalam Jogyanto (2005,h.11) Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi ,bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

3. Pengawasan, monitoring serta evaluasi terhadap Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dalam proses penatausahaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Malang

Pengawasan, monitoring serta evaluasi dilakukan agar dapat diketahui penatusahaan aset atau barang milik daerah melalui SIMBADA sesuai dengan kebijakan dan aturan yang telah dibuat sudah berjalan dengan baik atau belum.

Kemudian dari hasil pengawasan, monitoring serta evaluasi akan diketahui kekurangan-kekurangan dari SIMBADA dalam proses penatausahaan asset atau barang milik daerah dan akan dilakukan perbaikan dan pengembangan sistem baru yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap SKPD di Kabupaten Malang seperti halnya pendapat Jogyanto (2005,h.35) Pengembangan sistem (*system development*) dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada, sistem yang lamaperlu diperbaiki atau diganti disebabkan beberapa kekurangan dari sistem tersebut.

Dalam proses pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh DPPKA khususnya bidang asset dan didampingi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembuat aplikasi SIMBADA dapat diketahui kelemahan serta kekurangan yang ada pada aplikasi SIMBADA. Karena, pada setiap sistem informasi pasti mempunyai kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan dan monitoring untuk mengevaluasi kelemahan dan kekurangan dari aplikasi SIMBADA. Seperti halnya menurut Jogyanto (2005,h.129) Analisis Sistem yaitu Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan analisis sistem yang disini berupa pengawasan dan monitoring akan diketahui kelemahan serta kekurangan dari aplikasi SIMBADA dalam proses penatausahaan asset atau barang milik daerah. Kemudian setelah diketahui kelemahan serta kekurangan dari aplikasi SIMBADA, maka akan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kembali kelemahan serta kekurangan yang ada pada aplikasi

SIMBADA. Permasalahan-permasalahan yang timbul pada sistem yang lama menurut Jogyanto (2005,h.35) dapat berupa:

- a. Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru.

4. Dampak dari adanya Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dalam proses penatausahaan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Malang

Penerapan sebuah sistem informasi manajemen pasti memberikan dampak bagi pemakai sistem informasi tersebut, baik dampak positif maupun negatif. Seperti halnya dampak dari penerapan SIMBADA dalam proses penatusahaan asset atau barang milik daerah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Jogyanto (2010,h.18) dalam Peranan Sistem Informasi Bagi Manajemen, beberapa manfaat atau peranan serta fungsi sistem informasi antara lain adalah:

- a. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya prantara sistem informasi.
- b. Mengembangkan proses perencanaan asset atau barang milik daerah yang efektif.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi.
- d. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.
- e. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka.

Dari beberapa manfaat sistem informasi bagi manajemen diatas, dapat disimpulkan bahwa SIMBADA juga berdampak pada proses penatausahaan asset atau barang milik daerah, secara garis besar dampak positif dari adanya SIMBADA dalam proses penatausahaan asset atau

barang milik daerah memudahkan pengelola asset atau barang milik daerah dalam proses pencatatan data, pencatatan data lebih cepat dilakukan melalui SIMBADA.

Namun, pada faktanya terdapat adanya dampak negatif dari adanya SIMBADA yaitu pihak pengelola terlalu percaya dan bergantung dengan data-data yang ada pada SIMBADA, dan tidak memverifikasi secara langsung keberadaan data yang ada di tiap-tiap SKPD dan dilapangan, sehingga terkadang terjadi adanya ketidaksesuaian antara data yang ada di SIMBADA dan data lapangan. Karena pada dasarnya sistem informasi merupakan suatu cara untuk membantu suatu organisasi dalam proses pengambilan keputusan dengan cepat. Seperti menurut pendapat Leitch dan Davis dalam Jogyanto (2005,h.11) bahwa Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

5. Kendala Dalam Proses Penatausahaan Asset Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

a. Belum Tersedia Sistem Aplikasi Pada Program di SIMBADA

Dalam hal sistem aplikasi SIMBADA yang belum memadai untuk proses pendataan asset atau barang daerah dalam penatausahaan asset atau barang milik daerah, merupakan kendala yang wajar dalam sebuah sistem informasi manajemen oleh karena itu dibutuhkan analisis sistem dan pengembangan sistem agar kelemahan dan kekurangan dari sistem informasi manajemen yang ada bisa di perbaiki.

“Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-

kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya”. (Jogyanto, 2005,h.129)

Selain diperlukan adanya analisis sistem, dalam aplikasi SIMBADA juga dibutuhkan adanya pengembangan sistem guna meningkatkan kinerja sistem dalam penatausahaan asset atau barang milik daerah di Kabupaten Malang, seperti menurut Jogyanto (2005,h.35) Pengembangan sistem (*system development*) berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada.

b. Kurangnya ketersediaan data asset atau barang milik daerah

Kurangnya ketersediaan data dilapangan merupakan salah satu permasalahan dalam penatausahaan asset atau barang milik daerah, hal tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2010,h.158) belum dilakukannya inventarisasi seluruh asset daerah hal ini disebabkan karena pencatatan yang tidak tertib, ada catatannya tetapi tidak ada barangnya; adanya data inventaris asset atau barang milik daerah yang berbeda-beda antara yang terdapat disatuan kerja dengan data yang terdapat di biro/bagian perlengkapan, dan di bagian keuangan/BPKD; tidak dilakukan pencatatan mengenai mutasi barang dan tidak adanya pengamanan yang memadai. Kemudian sesuai dengan azas kepastian nilai yaitu pengelolaan asset atau barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan asset atau barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Oleh karena itu ketersediaan data dilapangan merupakan hal yang penting dalam proses penatausahaan asset atau barang milik daerah. Hal tersebut didukung pendapat dari Antony dan Dearden dalam Jogyanto (2005,h.9) Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan.

c. Kurangnya Sumber Daya Manusia Khususnya Pengelola Asset Daerah yang berlatar belakang Teknologi Informasi.

Di samping masalah ketersediaan data dilapangan, menurut Mahmudi (2010,h.158) lemahnya koordinasi dan pengawasan atas pengelolaan asset atau barang milik daerah merupakan hal yang cukup berpengaruh dalam proses penatausahaan asset atau barang milik daerah melalui SIMBADA. Dalam hal ini kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang teknologi informasi khususnya bagi operator SIMBADA, menyebabkan lemahnya koordinasi untuk proses pengelolaan asset atau barang milik daerah melalui SIMBADA. Dengan kurangnya kualitas sumberdaya manusia dalam bidang teknologi informasi yang notabene merupakan pengetahuan dasar untuk pengaplikasian dari SIMBADA, maka akan mengakibatkan lemahnya koordinasi dalam proses penatausahaan asset melalui SIMBADA.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses penatausahaan asset atau barang milik daerah melalui SIMBADA Pemerintah kabupaten Malang khususnya disini DPPKA Bidang Asset selaku pengelola asset atau barang milik daerah berusaha menerapkan program SIMBADA dalam proses pengelolaan

asset atau barang milik daerah. Meskipun pada faktanya SIMBADA belum sepenuhnya digunakan secara keseluruhan pada proses pengelolaan asset atau barang milik daerah. Namun, jika dijalankan dengan tertib dalam hal penatausahaan akan dapat mempengaruhi mekanisme pengelolaan asset daerah yang lainnya. Kemudian untuk proses pengawasan, monitoring serta evaluasi terhadap SIMBADA dalam proses penatausahaan asset daerah dilaksanakan oleh DPPKA khususnya bidang asset selaku pengelola asset daerah mendapat pendampingan dari Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam penerapan SIMBADA berdampak pada proses penatausahaan asset daerah, baik dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi lebih baik untuk pengawasan, monitoring serta evaluasi baik untuk program SIMBADA dan pihak pengelola asset daerah.

2. Kendala dalam penatausahaan asset atau barang milik daerah melalui SIMBADA adalah:
 - a. Adanya sistem aplikasi yang belum tersedia di SIMBADA;
 - b. Kurangnya ketersediaan data di lapangan;
 - c. Kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya pengelola asset atau barang milik daerah yang berlatar belakang Teknologi Informasi.

Daftar Pustaka

- Jogiyanto.HM.(2005).**Sistem Teknologi Informasi: Pendekatan Terintegrasi: Konsep dasar,teknologi,aplikasi, pengembangan dan pengelolaan. Edisi 2.**Yogyakarta: Andi Offset
- Mahmudi.(2010). **Manajemen Keuangan Daerah.**Jakarta: Erlangga
- Moleong, Lexy. J. (2001). **Metodologi Penelitian kualitatif, cetakan keempatbelas.** Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Pasolong.(2007).**Teori Administrasi Publik.**Bandung:Alfabeta
- Sugiyono.(2009).**Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif.** Bandung : Alfabet
- Widjaja, HAW.(2005). **Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia.** Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.